

RENCANA AKSI KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Papua Barat Daya perlu menyusun sebuah perencanaan. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Perencanaan yang disusun KPU Provinsi Papua Barat Daya adalah Rencana Aksi Kinerja (RAK) untuk periode 1 (satu) tahun.

RAK KPU Provinsi Papua Barat Daya memuat perencanaan program, kegiatan, dan anggaran dari masing-masing bagian, yaitu Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Bagian Hukum dan SDM.

Selanjutnya RAK tersebut akan digunakan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2024. Dalam perjalanannya, perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan yang disusun melalui kegiatan evaluasi secara berkala.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan RAK KPU Provinsi Papua Barat Daya

Tahun 2024 adalah:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan KPU Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2024 sesuai dengan visi, misi, dan tujuan KPU RI;
2. Menjadi guidance pelaksanaan kegiatan KPU Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2024 sekaligus pengendaliannya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup RAK KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 adalah penjabaran terhadap program dan kegiatan berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Anggaran K/L DIPA APBN KPU Provinsi Papua Barat Daya.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

A. Visi KPU Provinsi Papua Barat Daya

Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020-2024, Visi KPU Provinsi Papua Barat Daya adalah:

*Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang
Mandiri, Profesional dan Berintegritas*

B. Misi KPU Provinsi Papua Barat Daya

Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020- 2024, Misi KPU Provinsi Papua Barat Daya adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan KPU Provinsi Papua Barat Daya

Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2020- 2024, maka tujuan KPU Provinsi Papua Barat Daya adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

BAB III RENCANA AKSI KINERJA

Pada Tahun 2024, sebagaimana yang termuat dalam DIPA Nomor: SP DIPA- 076.01.2.670903/2024 tanggal 30 November 2022, KPU Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. **176.332.529.000**, pagu anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp. 170.231.789.000,-
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 6.100.740.000,-

Dari pagu anggaran masing-masing program, dijabarkan kembali menjadi rencana program dan anggaran masing-masing bagian sebagai berikut:

A. RENCANA AKSI KINERJA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 2. Rapat Pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kab.Kota se-Papua Barat Daya 3. Rakor Sinkronisasi Program dan Anggaran 4. Rakor Pembentukan Badan Adhoc 5. Rakor/Bimtek Sengketa Pemilu 	√	√	√	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Sosdiklih dan Parmas SDM 2. Divisi Hukum Pengawasan 3. Divisi Perencanaan dan Datin 4. Divisi Sosdiklih dan Parmas SDM 5. Divisi Hukum dan Pengawasan 	1 (satu) dokumen	931.768.000
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan	100%	Inventarisir dan Pemeliharaan Logistik Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa KPU 2. Rakor persiapan dan perencanaan logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 3. Rakor pengelolaan 	√	√	√	√	Divisi Keuangan dan Logistik Rumah Tangga	1 (satu) dokumen	1.075.408.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
	suara dalam Pemilu/Pemilihan			logistik Pemilu/Pemilihan tahun 2024 4. Supervisi dan Monitoring Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan 2024							
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Se-Papua Barat Daya yang menyelenggarakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Perempuan	100%	Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	1. Sosialisasi Tatap Muka 2. Media Gathering 3. Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	√	√	√	√	Divisi Sosdiklih dan Parmas	1 (satu) dokumen	487.776.000
	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat yang menyelenggarakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Disabilitas	75%		1. Sosialisasi Tatap Muka 2. Media Gathering 3. Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	√	√	√	√			
Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya yang disusun dan diharmonisasi	100%	Penetapan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya	1. Rapat Koordinasi Internal Harmonisasi Penyusunan Surat Keputusan KPU Provinsi	√	√	√	√	Divisi Hukum dan Pengawasan	1 (satu) dokumen	35.073.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU			Papua Barat Daya 2. Pelatihan legal drafting 3. Bimtek JDIH							
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Papua Barat Daya	89%	Penyelesaian Sengketa Hukum	1. Pelatihan advokasi hukum 2. Bimtek/Rakor Sengketa Pencalonan	√	√	√	√	Divisi Hukum dan Pengawasan	1 (satu) dokumen	35.073.000
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Papua Barat yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 2. Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan	√	√	√	√	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	1 (satu) dokumen	0
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota	Penyiapan dokumen calon anggota KPU penggantian antar waktu	√	√	√	√	Divisi Teknis Penyelenggaraan	1 (satu) dokumen	0
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat	100%	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan	1. Rapat Koordinasi Internal Penyusunan SAKIP dan	√	√	√	√	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	1 (satu) dokumen	246.853.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Kinerja KPU	yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Minimal B		Akuntabilitas	Evaluasi Capaian Kinerja 2. Rapat Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Papua Barat Daya 3. Rakor Pemantauan Capaian Kinerja dan Anggaran 4. Bimtek SAKIP dan LAKIP 5. Monev Program dan Anggaran							
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Rapat Koordinasi Kick Off Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat 2. Bimtek Penyusunan SOP 3. Pelatihan Peningkatan Pelayanan Publik 4. Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Lembar Kerja	√	√	√	√	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	1 (satu) dokumen	0

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
				Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023							

B. RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT KPU PAPUA BARAT DAYA

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggung jawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 di Tahun 2022	1. Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 2. Rapat Pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kab.Kota se-Papua Barat Daya 3. Rakor Sinkronisasi Program dan Anggaran 4. Rakor Pembentukan Badan Adhoc 5. Rakor/Bimtek Sengketa Pemilu	√	√	√	√	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Parmas	1 (satu) dokumen	1.202.727.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	Inventarisir dan Pemeliharaan Logistik Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> Bimtek Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa KPU Rakor persiapan dan perencanaan logistik Pemilu 2024 Rakor pengelolaan dokumentasi logistik Pemilu 2024 Supervisi dan Monitoring Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 			√	√	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1 (satu) dokumen	1.075.408.000
Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	Penetapan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Internal Harmonisasi Penyusunan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Pelatihan legal drafting Bimtek JDIIH 			√	√	Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	1 (satu) dokumen	35.073.000
Meningkatnya	Persentase	100%	Pemberian	1. Rapat Evaluasi			√	√	Bagian Teknis	1 (satu)	105.000.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP		Layanan PPID	Daftar Informasi Publik (DIP) 2. Sosialisasi SOP PPID					Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	dokumen	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%		1. Bimtek penulisan berita di website 2. Rakor Optimalisasi Medsos			√	√	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Minimal B	100%	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas	1. Rakor Internal Penyusunan SAKIP dan Evaluasi Capaian Kinerja 2. Rakor Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 3. Rakor Pemantauan			√	√	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	1 (satu) dokumen	20.242.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
				Capaian Kinerja dan Anggaran 4. Bimtek SAKIP dan LAKIP 5. Monev Program dan Anggaran							
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Rapat Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran			√	√	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1 (satu) dokumen	246.853.000
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%	Pemberian Layanan Administrasi Pegawai	1. Rakor SDM 2. Coffee Morning dengan peserta Sekretaris dan Pejabat struktural serta fungsional KPU Kab/Kota Se-Papua Barat Daya			√	√	Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	1 (satu) dokumen	0

Sasaran Program	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Aksi	Rincian Aktivitas	Rencana Pelaksanaan				Penanggungjawab	Keluaran	Anggaran
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	1. Pemeliharaan gedung dan bangunan 2. Perawatan peralatan dan mesin			√	√	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1 (satu) dokumen	5.152.197.000
Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Papua Barat Daya yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tepat waktu	100%	Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	1. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 2. Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan			√	√	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	1 (satu) dokumen	0

BAB III

PENUTUP

Demikian dokumen RAK Tahun 2024 ini disusun oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Evaluasi terhadap Perencanaan Program dan Anggaran akan dilaksanakan setiap triwulan dalam rangka pengendalian.

Kota Sorong, Januari 2024
Sekretaris,



TOTOK HENDRATMOKO